



MIMIKA MEMBANGUN

Eme Neme Yauware



Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

Pengarah

Bupati Mimika

Penanggungjawab

Kepala Bappeda

Tim Redaksi Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



Mimika Membangun Edisi September

Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-8
- Laporan Khusus Hal. 9-21
- Bidang Infrastruktur Hal. 22-31
- Bidang Sosial Budaya Hal. 32-40
- Bidang Ekonomi Hal. 41-47



Bupati Mimika Eltinus Omaleng Kembali Aktif Menjabat

MENGACU pada putusan Pengadilan Tipikor Makassar yang menyatakan Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH tidak bersalah sehingga divonis bebas. Dasar putusan pengadilan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali Eltinus Omaleng menjadi Bupati Mimika periode 2019-2024.

Pengaktifan kembali Eltinus Omaleng ditandai dengan serah terima jabatan dari Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito kepada Eltinus Omaleng sebagai Bupati Mimika definitif yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk di Gedung Eme Neme Yauware, Senin (4/9/2023).



Foto: Bappeda



Pengaktifan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Noor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 dan melalui acara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk di Gedung Eme Neme Yauwere, Kota Timika, Senin (4/9/2023).

Valentinus sebelumnya ditunjuk jadi Pj Bupati Mimika setelah Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menjadi yang ditunjuk jadi Pelaksana Tugas Bupati Mimika juga bernasib sama setelah perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Jayapura sehingga John Rettob juga dinonaktifkan dari jabatan.

Valentinus Sudarjanto Sumito merupakan *Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus* dan Dewan Pertimbangan Otonomi *Daerah* pada *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah* Kemendagri dan juga sebelumnya jadi Pj Sekda Papua Tengah.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan dinamika yang terjadi di Kabupaten Mimika menjadi pembelajaran bahwa siapapun tidak ada yang kebal hukum. "Semua kita wajib dan taat kepada hukum, tidak ada yang kebal hukum, tidak ada tebang pilih. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus diproses hukum," katanya.

Adapun yang dialami Bupati Mimika Eltinus Omaleng menurutnya merupakan wujud sebuah supremasi hukum. Dimana Eltinus Omaleng telah menjalani proses hukum hingga akhirnya hukum sendiri yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sehingga berdasarkan hukum dan aturan pula, Eltinus Omaleng dikembalikan pada jabatannya menjadi Bupati Mimika hingga masa jabatannya berakhir pada Tahun 2024 mendatang.

"Bapak Eltinus Omaleng diberhentikan, pasti ada yang bertanya. Tapi hari ini, hukum juga yang kembalikan Bapak Omaleng ke jabatannya karena mampu membuktikan bahwa tidak bersalah," tandasnya.

Beberapa pesan dan amanah yang disampaikan Pj Gubernur Papua Tengah kepada Eltinus Omaleng salah



Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyerahkan SK pengaktifan kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng



satunya percepatan serapan anggaran yang masih sangat rendah. Kemudian upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah sehat dan layak huni kepada masyarakat di Pelabuhan Pomako, pengendalian stunting dan suksesi Pemilu Tahun 2024 mendatang.

“Saya beri apresiasi kepada Bupati sebagai anak adat, kepala suku, selamat kembali ke tanah kelahiran laksanakan tugas, saya yakin Tuhan pasti tuntun dalam jalankan tugas melayani masyarakat,” ujar Pj Gubernur.

Sementara itu Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukungnya dalam doa sehingga ia bisa kembali menjabat. “Saya ajak kita bekerja baik dan jujur

di tanah ini sehingga apa yang jadi visi misi bisa dikerjakan, berdiri sebagai saudara dan bergandengan tangan bersatu bangun Mimika tercinta,” ujar Bupati Omaleng.

Valentinus Sudarjanto Sumito merupakan *Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus* dan Dewan Pertimbangan Otonomi *Daerah* pada *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah* Kemendagri yang sebelumnya jadi Pj Bupati Mimika menyatakan sertijab ini jadi jawaban atas pertanyaan banyak pihak yang menuding kehadirannya di Mimika untuk kepentingan orang tertentu. “Bapak Mendagri dengan tegas katakana semua adalah proses pemerintahan yang harus dijalani,” tandasnya.

Ia menilai jajaran Pemkab Mimika

sangat luar biasa meskipun dalam kurun waktu dua setengah bulan ia berupaya melakukan percepatan yang tentunya membuat para perangkat daerah dan ASN terpaksa bekerja secara maraton.

Dengan kehadiran Bupati definitif yakni Eltinus Omaleng, ia yakin dinamika akan semakin menarik dan bisa mempercepat program yang sudah direncanakan. Salah satu titipan Valentinus kepada Bupati Omaleng adalah peningkatan anggaran untuk distrik dan tambahan gaji untuk guru honorer. **(BAPPEDA)**



Valentinus Sudarjanto Sumito menyerahkan memori jabatan kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng



Bupati Eltinus Omaleng Disambut Ribuan Warga

BUPATI Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH akhirnya kembali ke Timika setelah hampir setahun bergumul dengan proses hukum yang menyeret namanya dalam kasus korupsi pembangunan Gereja KINGMI Mile 32.





Didampingi anak sulungnya Alex Omaleng yang baru saja mengikuti wisuda S2 di Jayapura, Bupati Omaleng tiba

dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang mendarat sekitar pukul 11.30 WIT.

Di terminal kedatangan, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang jumlahnya ribuan





sudah menunggu sembari menyanyikan lagu rohani dan lagu berbahasa daerah.

Begitu turun dari pesawat Eltinus Omaleng langsung didoakan oleh para Pendeta yang sudah menunggu. Ia kemudian keluar dari gedung bandara dan disambut riuh masyarakat.

Dari bandara, Bupati Eltinus Omaleng bersama masyarakat melakukan konvoi di Kota Timika dan selanjutnya ke Gereja KINGMI Mile 32, dimana ribuan

masyarakat juga sudah menunggu dengan menggelar pesta adar bakar batu.

Begitu tiba, Bupati Omaleng langsung masuk dalam gedung gereja untuk mengikuti doa syukur. Puluhan pendeta menyambutnya dan menumpangkan tangan mendoakan Eltinus Omaleng.

Saat diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya, Bupati Eltinus Omaleng mengatakan bahwa apa yang

dialaminya sekarang ini adalah mujizat yang datangnya dari Tuhan Yesus. "Hari ini saya ada di sini karena Tuhan Yesus. Luar biasa mujizat Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya," ucapnya bersyukur.

Baginya, apa yang dialami kurang lebih setahun ini merupakan sebuah perjalanan hidup dan membuatnya semakin dekat kepada Tuhan. **(BAP-PEDA)**



Menteri Perdagangan Puji Kinerja Bupati Mimika

SAAT berkunjung pada Senin-Selasa (18-19/9/2023) Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memiliki kesan tersendiri dengan Kabupaten Mimika. Terutama perkembangan dan kemajuan di Mimika. Mulai dari Bandara Mozes Kilangin yang sekarang ini sudah tampil dengan wajah baru hingga infrastruktur jalan yang sangat bagus.

Saat berkunjung ke Pasar Sentral Timika, Mendag Zulkifli Hasan yang didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menemui para pedagang dan memantau harga serta pasokan komoditi bahan pokok mulai dari beras, cabe, bawang dan lainnya.

Mendag terkesan dengan kondisi Pasar Sentral Timika yang menurutnya bersih dan ramai oleh pengunjung sehingga bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Jalan dalam pasar sudah diaspal bahkan bagian depan difungsikan jadi pusat kuliner sekaligus tempat hiburan bagi masyarakat Kota Timika.

Dari Pasar Sentral, Mendag melanjutkan agenda pembagian sembako kepada masyarakat yang dipusatkan di



halaman Gereja KINGMI Mile 32. Jadi, selama kunjungan di Timika, Mendag melintasi ruas jalan dalam Kota Timika. Ia terkesan dengan infrastruktur jalan yang sangat bagus.

Mendag secara terang-terangan memuji Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di depan masyarakat. "Kita baru saja cek harga di Pasar Sentral. Ramai sekali pasarnya, bagus, bersih. Ini memang Bupati rajin kerja. Jalan-jalan bagus di Timika," ujarnya.

Sejak tiba di Timika, Mendag disambut

Bupati Omaleng sekaligus memperhatikan kondisi terbaru Bandara Mozes Kilangin yang dibangun dengan sharing anggaran antara pemerintah pusat dan Pemkab Mimika. Begitu juga dengan infrastruktur jalan yang dibuat lebih lebar dan dilengkapi fasilitas penerangan jalan. "Saya sering ke luar dan lihat di daerah lain itu sudah maju, jadi saya juga ingin Mimika seperti itu, tidak ketinggalan," kata Bupati Omaleng saat berbincang dengan Mendag Zulkifli Hasan. (BAPPEDA)



Mendag Zulkifli Hasan Blusukan Pantau Harga di Pasar Sentral Timika

MENTERI Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Selasa (19/9/2023). Agenda utama kedatangan Mendag adalah untuk memantau stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di Kabupaten Mimika yang merupakan penyangga bagi beberapa kabupaten tidak hanya di Provinsi Papua Tengah tapi juga Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Mendag blusukan ke Pasar Sentral Timika. Ia bertemu dengan pedagang. Mulai dari pedagang beras, cabe, telur dan pedagang sembako lainnya. Tak terlewatkan, Mendag menemui mama-mama Papua yang menjual umbi-umbian dan sayur.

Kedatangan Mendag mengundang perhatian pedagang dan masyarakat. Apalagi, Mendag tidak hanya sekadar menyapa tapi langsung

mendorong jualan para pedagang yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kebetulan datang berbelanja.

Sebelum meninggalkan Pasar Sentral, Mendag juga memastikan operasi gerakan pangan murah dalam rangka stabilitas harga yang dijalankan oleh Pemkab Mimika bekerjasama Bulog. Beras yang disediakan, seluruhnya dibeli Mendag dan langsung dibagikan kepada masyarakat secara gratis.





Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memantau harga komoditi di Pasar Sentral Timika.

Mendag menyatakan, dari hasil kunjungannya harga dan pasokan bahan pokok di Mimika sangat stabil. "Saya sama Bupati Mimika dan Bupati Puncak. Kita lihat harga di sini, stabil. Barang banyak, karena suplai banyak maka harga termasuk murah. Tadi bawang Rp 35 ribu, cabe Rp 60 ribu, beras, minyak goreng, telur, semua lengkap harga terjangkau dan stabil. Harga sesuai dengan yang ditentukan oleh

pemerintah," jelasnya.

Adapun disparitas harga yang terjadi di Papua selama ini kata dia karena terkendala akses untuk distribusi. Daerah pedalaman hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara, sehingga pemerintah sedang berupaya membangun infrastruktur jalan untuk melancarkan arus distribusi barang dalam rangka menekan disparitas harga. (BAP-PEDA)



Bupati Resmikan RS Tipe D Waa Banti Tembagapura

KAMPUNG Banti yang berada di lembah Distrik Tembagapura kini mulai bangkit kembali. Ditandai dengan hadirnya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit tipe D yang dibangun Pemerintah Kabupaten Mimika pada Tahun Anggaran 2022 lewat perjuangan Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH ke Kementerian Kesehatan.



Ini adalah sebuah persembahan Bupati Omaleng kepada Kampung Banti, kampung dimana ia dilahirkan. Rasa bangga ia utarakan saat meresmikan RS Waa Banti pada Jumat (15/9/2023). Kepulangannya ke kampung halaman disambut ribuan warga dari tiga kampung yakni Banti 1, Banti 2 dan Opitawak.

Peresmian dihadiri Forkopimda Mimika, Plt Sekda Mimika Robert Mayaut, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Silwanus Sumule, Kadinkes Mimika Reynold Ubra, Direktur RSUD dr Antonius Pasulu, manajemen PT Freeport Indonesia.

Kampung Banti kata Bupati Omaleng,



Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian RS Tipe D Waa Banti, Distrik Tembapapura.





dalam beberapa tahun mengalami kemunduran akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata. Rumah sakit, sekolah hingga rumah masyarakat dibakar. “Saya menangis kenapa harus ganggu

rumah sakit dan sekolah,” katanya.

Setelah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mengamankan Kampung Banti dan sekitarnya, Bupati Omaleng kemudian mengajukan ke Kementerian

Kesehatan yang akhirnya pada Tahun 2022 lalu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ini bukan Freeport yang bangun, jadi rumah sakit ini hasil perjuangan saya, begitu pulang saya resmikan rumah sakit mewah ini,” tegasnya.

Selain rumah sakit, Bupati juga sudah mengusulkan anggaran pembangunan jalan mulai dari Opitawak ke Aroanop. Selanjutnya rumah sakit serupa juga akan dibangun di Kampung Ainggogin.

Bupati meminta TNI dan Polri untuk membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan di Banti. Jika ada yang membuat kisruh harus diberi tindakan tegas sehingga tidak menimbulkan kerusuhan.

Operasional RS Waa Banti dikelola oleh tenaga medis yang berpengalaman. Termasuk beberapa putra-putri Amungme yang memiliki keahlian di bidang medis. Masyarakat setempat juga diberdayakan menjadi pekerja seperti laundry, cleaning service atau bagian yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Dengan begitu kata Bupati, rasa memiliki dari masyarakat akan semakin baik dan turut menjaga.

Tokoh masyarakat, Yanes Natkime memberi apresiasi kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang sudah membangun sebuah rumah sakit mewah di Banti. “Ini merupakan kemajuan, Banti tidak lagi tertinggal. Rumah sakit hadir di kampung, di tengah masyarakat itu hal luar biasa, terima kasih atas kebangkitan ini,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr Silwanus Sumule bahkan mengatakan dari 14 rumah sakit di Papua Tengah, RS Waa Banti merupakan rumah sakit tipe D paling terbaik. Fasilitas layanan kesehatan ini memiliki gedung, peralatan dan SDM yang luar biasa. Tinggal yang akan dikejar adalah akreditasi dan itu akan diproses dalam tiga bulan ke depan dengan harapan bisa mendapat predikat paripurna.

RS Waa Banti adalah rumah sakit tipe D yang dibangun Pemkab Mimika melalui Dinas Kesehatan. Gedung yang





terdiri dari dua lantai dengan konstruksi beton itu berdiri megah di cela pegunungan Tembagapura. Bahkan memiliki lift sebagai akses membawa pasien dari lantai 1 ke lantai 2.

Layaknya sebuah rumah sakit, RS Waa Banti memiliki sejumlah layanan mulai dari unit gawat darurat, kamar operasi dan sejumlah layanan lainnya. Sejak dibuka, RS Waa Banti telah melayani persalinan pertama dan bayi itu diberi nama Pratama Otniel karena merupakan bayi pertama yang lahir.

RS Waa Banti dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika dengan total anggaran sekitar Rp 60 miliar rupiah. Anggaran sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah, namun PTFI juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan rumah sakit tersebut. PTFI mendukung transportasi material dan pergerakan tenaga kerja, penyediaan material tertentu, air bersih, genset listrik, peralatan konstruksi, dukungan teknis, dan 1 (satu) unit ambulans. Total dukungan PTFI selama tahap konstruksi sekitar Rp 5 miliar



rupiah.

Senior Vice President Community Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum mengungkapkan disepati pula bahwa keterlibatan PTFI tidak hanya dalam proses pembangunan, PTFI juga akan mendukung operasional rumah sakit tersebut dengan menyediakan satu ambulance, akomodasi sementara bagi para tenaga

kesehatan, bantuan makan sementara, satu unit Light Vehicle (LV) untuk mobilisasi, bantuan bahan bakar untuk genset dan LV, transportasi untuk tenaga kesehatan dan logistik (rute Timika - Banti - Timika), jalur komunikasi, pengelolaan limbah medis, perawatan LV dan Genset, serta dukungan dari RS Freeport Tembagapura. (BAPPEDA)





Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas Sekda Mimika



Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menyerahkan SK penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Sekda Mimika kepada Domingus Robert Mayaut

HANYA dalam hitungan jam, setelah diaktifkan kembali, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng langsung melantik pejabat pimpinan tinggi pertama untuk beberapa posisi salah satunya Sekretaris Daerah.

Bupati Eltinus Omaleng menunjuk Ir Domingus Robert Mayaut yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika. Pelantikan digelar Senin (4/9/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mimika.





Foto: Bappeda

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengambil sumpah janji dan melantik tiga pejabat yang sebelumnya dinonjobkan.



Foto: Bappeda

Sebagaimana SK yang dibacakan, salah satu dasar pertimbangan adalah tidak diperpanjangnya masa jabatan Pj Sekda Mimika yang diduduki Petrus Yumte sejak Oktober 2022. Sehingga untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan maka Bupati Omaleng menunjuk Robert Mayaut menjadi Plt Sekda Mimika.

Selain mengganti jabatan Sekda, Bupati Omaleng juga mengembalikan tiga pejabat yang sebelumnya dicopot John Rettob kembali ke jabatannya semula. Keputusan ini menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tiga pejabat tersebut yakni Jania Basir Rantedanun sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Jeni Usmany menjadi Kepala Dinas Pendidikan serta Ida Wahyuni sebagai Kepala Dinas Perhubungan Mimika.

Pengembalian tiga pejabat tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan pelantikan yang dipimpin lang-

sung Bupati Eltinus Omaleng pada Senin (4/9/2023) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Menurut Bupati Omaleng, pencopotan tiga pejabat tersebut pada Oktober 2022 lalu menyalahi aturan sehingga dari Kemendagri dan KASN diperintahkan untuk dikembalikan ke jabatannya.

Dengan dilantikya kembali tiga pejabat tersebut maka pejabat yang sebelumnya ditunjuk jadi Plt seperti Willem Naa sebagai Kadis Pendidikan, Nella Manggara sebagai Plt Kadis Perhubungan diberhentikan dari jabatannya. Sementara Marthen Mallisa kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial.

Bupati Omaleng menyatakan ini baru tahap awal dalam penataan birokrasi yang dinilai amburadul selama ditinggalkan selama kurang lebih setahun. Ia sudah memerintahkan Plt Sekda untuk menyiapkan panitia seleksi dalam rangka seleksi jabatan baik itu eselon II, eselon III dan eselon IV. (BAPPEDA)

Pemprov Papua Tengah dan Kejati Papua Jalin MoU

DALAM rangka mencegah adanya konsekuensi hukum dari program atau kebijakan yang dijalankan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Papua dalam hal pendampingan hukum.

Penandatanganan MoU dilakukan Selasa (19/9/2023) di Hotel Horison Diana Timika oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Elisabeth Tsenawatin bersama LO Kajati Papua Tengah yakni Teddy Widodo, SH, MH. Turut hadir perwakilan setiap Pemkab yang ada di lingkup Provinsi Papua Tengah.

LO Kajati Papua Tengah yakni Teddy Widodo, SH, MH menjelaskan, MoU ini berkaitan dengan pendampingan kepada pemerintah dalam hal keperdataan maupun tata usaha negara. Sehingga dalam menjalankan pekerjaan, pejabat atau instansi pemerintah bisa mendapat pertimbangan hukum agar tidak menyimpang dan melanggar.

Untuk itu kata Teddy, MoU ini memuat beberapa poin. Pertama terkait dengan penegakan hukum, yakni apabila Pemprov Papua Tengah mendapat gugatan atau sengketa kasus maka, Pemprov bisa membuat surat kuasa khusus kepada Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara.

Kedua, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, sebagai aparat penegak hukum dalam penyidikan penuntutan bidang pidana umum maupun tindak pidana korupsi, maka Kejaksaan bisa memberikan pendampingan hukum atau legal asisten. Ketiga, memberikan pendapat hukum atau legal opinion, yakni



Foto: Bappeda

Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua.

memberian surat kuasa khusus kepada Jaksa dalam memberikan pendapat hukum. Keempat, MoU ini juga memberikan bantuan hukum kepada Pemprov Papua Tengah maupun masyarakat.

Sementara itu Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Elisabeth Tsenawatin mengungkapkan, sejak berdiri sekitar 11 bulan lalu, Pemprov Papua Tengah telah melahirkan puluhan produk hukum. Tahun 2022 ada 44 produk hukum berupa 29 Peraturan Gubernur dan 15 Keputusan Gubernur. Kemudian Tahun 2023 ada 35 Peraturan Gubernur dan 118 keputusan Gubernur. Di Tahun 2024 ditargetkan ada 57 produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Sebagai Daerah Otonom Baru, Elisabeth menyatakan Pemprov Papua Tengah sangat membutuhkan pendampingan hukum dalam rangka pengembangan kapasitas dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Kerja sama yang kita lakukan hari ini bermaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara sedangkan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum bagi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik dalam maupun di luar pengadilan,” jelasnya.

Adapun ruang lingkup kerja sama yakni, pemberian bantuan hukum oleh Jaksa pengacara negara secara litigasi dan nonlitigasi kepada Provinsi Papua Tengah. Pemberian pertimbangan hukum atau legal opinion asistensi kepada Provinsi Papua Tengah. Kemudian tindakan hukum memulihkan keuangan negara melalui negosiasi mediasi dan fasilitasi. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan sosialisasi dan seminar. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset serta mitigasi resiko hukum termasuk pencegahan tindak pidana korupsi. (BAPPEDA)

Gubernur se-Tanah Papua Rapat Koordinasi di Mimika

PASCA terbentuknya empat Daerah Otonom Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya maka di Tanah Papua sekarang terdapat enam provinsi termasuk dua provinsi induk yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Sejalan dengan itu, para Gubernur sebagai kepala daerah sepakat untuk membentuk Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan menunjuk Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menjadi ketua.

Untuk menjalankan organisasi, mantan Kapolda Papua ini menginisiasi dilaksanakannya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk pertama kalinya dan memilih Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah yang pertama. Rakerda yang digelar Rabu (20/9/2023) itu juga dihadiri Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo serta perwakilan dari setiap provinsi.

Dalam Rakerda tersebut membahas beberapa isu strategis baik nasional maupun isu yang dihadapi secara umum di Papua yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama. Ada tujuh poin kesepakatan bersama.

Pertama, Badan Hukum Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua segera dibentuk dan ditargetkan sebelum akhir Tahun 2023. Kedua, Gubernur se-Tanah Papua mendukung kebijakan dan program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengangguran di Tanah Papua.

Ketiga, sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Keempat, Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua bersepakat untuk menyelesaikan pengalihan personel, peralatan, pembiayaan dan



Penandatanganan kesepakatan bersama Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua.



dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, melakukan kerja sama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah untuk peningkatan

produktivitas. Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjemati dan mengkoordinasikan kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga serta memperhatikan aspirasi yang berasal dari gubernur,

bupati dan walikota se-Tanah Papua.

Yang terakhir, ketujuh adalah Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua bersepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilu legislatif, presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024





dengan tertib dan damai.

Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Paulus Waterpauw mengatakan asosiasi ini akan menjadi wadah untuk menjalin sinergitas kebijakan dan program dari masing-masing daerah di Papua sehingga apa yang

menjadi permasalahan yang dihadapi bisa tertangani seperti kemiskinan ekstrem dimana Papua menempati urutan paling terbawah sehingga disebut daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Begitu juga dengan isu lain terma-

suk menjembatani daerah di Papua dengan BP3OKP. Menurut Paulus, BP3OKP yang dibentuk oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo sangat tepat dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. **(BAPPEDA)**





Bupati Tinjau Pembangunan Jalan dan Gedung Perkantoran

SETELAH mendapat laporan tertulis dalam rapat monitoring dan evaluasi, Bupati Mimika Dr Eltinus Omaleng, SE MH langsung melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung progres pembangunan fisik.

Sejumlah proyek strategis ditinjau mulai dari Jalan Mayon, Jalan SP 2 - SP 5, gedung kantor Bappeda, Dinas Pendidikan, pembangunan terminal Bandara Mozes Kilangin, gedung kantor Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Bupati terjun langsung ke lapangan meski dalam kondisi hujan yang mengguyur Timika, Rabu (6/9/2023). Bupati merasa bangga melihat progres pembangunan yang tetap berjalan meski ia tak berada di Timika selama sekitar setahun.

Progres pembangunan kata Bupati, sudah rata-rata 60 persen sehingga ia optimis bisa rampung pada Desember 2023 mendatang. "Kami lihat luar biasa, saya sebagai pimpinan rasa puas sehingga semua kantor yang ada akan selesai di bulan Desember," ujar Bupati Omaleng.

Hasil kunjungan lapangan ini lanjut Bupati, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi berikutnya. Juga menjadi gambaran bahwa pelaksanaan APBD mulai meningkat dan menjadi dasar untuk pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023.

Meski banyak OPD membangun kantor di luar, Bupati memastikan Kantor Pusat Pemerintahan akan tetap ramai dan difokuskan untuk Sekretariat Daerah.

Adapun kantor yang dibangun di luar karena banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Disdukcapil sehingga bisa mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. **(BAPPEDA)**





Jalan Poros SP 2 - SP 5



Foto: Bappeda



Pembangunan Terminal Bandara Mozes Kilangin





Pembangunan kantor Dinas Perhubungan





Pembangunan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mimika





Pembangunan Kantor Badan Pendapatan Daerah



APBD Perubahan Mimika Ditetapkan Rp 7,2 Triliun

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 5,1 triliun jadi Rp 7,2 triliun. Perubahan anggaran ini telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Mimika.

Persetujuan ini disampaikan enam fraksi yakni Fraksi Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, Perindo dan Demokrat dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika dan penutupan sidang pembahasan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Sabtu (30/9/2023) di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Satu fraksi yakni PDIP tidak hadir menyampaikan pandangan karena seluruh anggotanya sedang mengikuti Rakernas PDIP.

Penutupan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dan Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme serta dihadiri anggota DPRD Mimika lainnya. Turut hadir Bupati Mimika, Eltinus Omaleng serta Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemkab Mimika.

Bupati Eltinus Omaleng mengungkapkan total belanja dianggarkan sebesar Rp 7.201.874.687.864. Untuk membiayai belanja, Pemkab Mimika menggali sumber pendapatan diantaranya Pendapatan Asli Daerah direncanakan berdasarkan Mrata-rata realisasi pendapatan asli daerah dengan melihat kondisi perkembangan daerah sebesar Rp 1.739.729.997.403.

Pendapatan transfer berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2023 serta pendapatan transfer dari provinsi sesuai SK Gubernur Provinsi



Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng menyerahkan SK hasil keputusan rapat paripurna tentang penetapan APBD Perubahan Tahun 2023 kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Papua Tengah sebesar Rp sebesar Rp 10.500.000.000

4.168.914.422.858 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan

Adapun pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023



sebesar Rp 1.282.730.267.603,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 12.400.000.000. Sehingga total belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 7.201.874.687.864.

Bupati Omaleng mengatakan rancangan APBD Perubahan tetap memperhatikan program perangkat daerah yang telah dimutakhirkan berpedoman pada Peraturan Mendagri dalam perencanaan

dan pembangunan dan keuangan daerah. Rancangan APBD P juga disusun secara elektronik dan terintegrasi tahapan perencanaan dengan sistem SIPD.

Bupati Omaleng berharap rancangan APBD P ini dapat dilakukan secara konstruktif dan disetujui menjadi APBD P Tahun Anggaran 2023. "Saya berharap Rancangan APBD P dapat dilakukan secara konstruktif sehingga sesu-

ai dengan jadwal dan dapat disetujui menjadi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023," jelasnya.

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng mengatak perubahan anggaran terjadi karena anggaran yang tidak sesuai seperti terjadinya pelampauan anggaran atau tidak tercapainya pendapatan daerah alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya





telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan DPRD dapat melakukan perubahan penyesuaian APBD satu tahun hanya satu kali.

Legislatif kata Anton Bukaleng memberikan apresiasi kepada Pemda kare-

na dalam melakukan penyesuaian perubahan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor

77 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah anggaran. Maka, sangatlah tepat dalam mengunci dan memprediksi penyusunan APBD Perubahan 2023. **(BAPPEDA)**



DPRD KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN MIMIKA DAN
ANGGARAN APBD PERUBAHAN
ANGGARAN 2023
TIMIKA.30 SEPT 2023



Foto: Bappeda

Bupati Evaluasi Kinerja OPD

SETELAH aktif kembali menjabat, Bupati Mimika Dr Eltinus Omaleng, SE MH langsung melaksanakan tugas pemerintahan. Sehari sebelumnya, pada Senin (4/9/2023) Bupati Omaleng mengganti Sekretaris Daerah dan melantik kembali tiga pejabat yang sebelumnya dinonjobkan.

Pada hari kedua, menindaklanjuti arahan dari Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk yang memberi perhatian khusus pada lambatnya progres pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka Bupati Eltinus Omaleng mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo pada Selasa (5/9/2023).

Dalam rapat tersebut Bupati Omaleng yang didampingi Plt Sekda Mimika, Dominggus Robert Mayaut melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD.

Bupati Omaleng menyatakan monitoring ini dilakukan untuk melihat kendala yang dihadapi setiap OPD. Pa-



Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH memimpin rapat monitoring dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

salnya dari sisi serapan anggaran hingga saat ini baru mencapai 35 persen. "Jadi ini kita cek di semua OPD karena masih sangat rendah," katanya.

Rendahnya serapan ini pula dikatakan Bupati membuat DPRD masih enggan untuk membahas APBD Perubahan Tahun 2023. Namun dengan rapat ini ia ingin mendapatkan informasi langsung dari OPD sehingga pembahasan APBD Perubahan bisa dipercepat dan pembangunan bisa terealisasi.

Apalagi dalam setahun terakhir den-

gan APBD yang mencapai Rp 5 triliun, Bupati Omaleng menilai tidak ada progres pembangunan yang terjadi. Adapun pembangunan yang berjalan seperti Jalan Cenderawasih yang telah selesai, pembangunan Jalan Mile 32 - Gorong gorong, Jalan Mayon dan Jalan SP 2 - SP 5 adalah proyek lanjutan yang sebelumnya Bupati sudah gagas dan menerapkan kontrak multiyears. Tapi pada Tahun 2023 tidak ada pembangunan baru yang nampak. (BAPPEDA)



Bupati Mimika Rombak Kepengurusan KONI dan LPPD

MELIHAT kondisi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berjalan, Bupati Mimika Eltinus Omaleng akhirnya mengambil sikap dengan melakukan perombakan kepengurusan yang memang belum dilantik.

Bupati Omaleng dalam rapat bersama pengurus cabang olahraga di Hotel Swisbell Timika pada Kamis (14/9/2023) menegaskan bahwa ia merombak pengurus karena memang belum dilantik sehingga ada kesempatan untuk menyusun kembali sebelum dilantik.

Dengan perombakan ini maka Bupati Mimika kembali menjadi Ketua Umum KONI. Ia juga menunjuk Simon Kasamol menjadi Sekretaris Umum KONI sekaligus Ketua Harian KONI Mimika.

Ia memerintahkan kepada pengurus untuk segera melengkapi kepengurusan.



Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memimpin rapat KONI Kabupaten Mimika.

Bupati berharap adanya pembaharuan dalam kepengurusan agar lebih fokus dalam pembinaan cabang olahraga.

“Berikan kesempatan kepada yang lain sehingga KONI jalan dengan baik.

Selama ini tidak jalan akhirnya venue jadi mubazir,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta agar pengurus cabang tidak mengajukan proposal anggaran sen-



Foto: Bappeda



diri tetapi melalui KONI.

Kebijakan Bupati Omaleng ini direspon baik oleh pengurus cabang yang berharap adanya perubahan karena selama ini pengurus KONI lebih banyak diisi oleh orang yang tidak punya kemampuan di bidang olahraga sementara pengurus cabang hanya menjadi penonton.

Tidak hanya merombak kepengurusan KONI, Bupati Mimika Eltinus Omaleng

dalam kedudukannya sebagai pembina juga melakukan pergantian pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Mimika.

Untuk kepengurusan baru, Bupati menunjuk Antonius Tapipea menjadi Ketua untuk selanjutnya ditugaskan melengkapi kepengurusan dan segera dilaantik. Itu disampaikan Bupati Omaleng dalam pertemuan yang digelar Kamis (14/9/2023) di Hotel Swissbel

Timika.

Perubahan struktur itu juga telah disampaikan langsung di hadapan pengurus lama dan ketua yang baru ditunjuk. "Kita mau rubah, yang lama diganti semua," tegasnya.

Bupati memerintahkan ketua baru untuk membentuk tim formatur dan melengkapi kepengurusan. "Kita tunjuk ketua jadi SK-nya juga dirubah," tandas Bupati Omaleng. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

Bupati Mimika Buka Sosialisasi Keprotokolan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, melalui Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah (Setda) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Jumat (22/09/2023) di Timika. Dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum pada Setda Mimika, Hendrite W. Tandiyono, S.E., M.M., dan narasumber Kepala Bagian Protokol pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Firmansyah Rasyid, S.IP., M.AP.

Bupati Mimika dalam sambutannya

menyatakan apresiasi kepada Bagian Humas dan Protokol Setda Mimika atas pelaksanaan kegiatan ini, sebab keprotokolan sangat penting. "Seperti tempat duduk kehormatan saat acara resmi, perlu diatur sesuai protokol. Hal itu harus dipahami dan dilaksanakan. Seharusnya dari dulu jalankan ini," imbau Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Eltinus juga mengucapkan selamat datang pada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan menyampaikan terima kasih sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmu yang luar biasa mengenai keprotokolan.

"Peran protokol bukan sekedar mem-

persiapkan segala sesuatu sebelum pejabat di satu daerah atau instansi melakukan kunjungan kerja. Tapi lebih dari itu. Tugas protokol sangat strategis, yaitu ikut meningkatkan pembentukan citra sebuah organisasi dan bertanggung jawab pada sukses atau tidaknya acara," tegas Bupati.

Menurutnya, semua kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh instansi, pemerintah ataupun swasta, dalam suksesnya suatu acara harus bisa menyamakan persepsi dan memperhatikan aturan yang berlaku, agar kegiatan berjalan dengan tertib, khidmat, rapi, lancar dan teratur.

"Saya berharap dengan adanya





kegiatan ini, Bapak Ibu saudara dapat belajar serta mendapat ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang keprotokolan, sehingga nantinya dapat mengimplementasikan dengan baik,” pesannya.

Sementara, dalam laporan panitia, ketua panitia kegiatan yakni Kepala Sub Bagian Protokol Setda Mimika, Ali Abbas Sermaf, S.STP. mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, memberikan pedoman agar suatu acara berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, serta menciptakan hubungan baik dalam tata komunikasi antar instansi pemerintah maupun instansi lainnya,” ujarnya.

Ali mengharapkan, setelah kegiatan ini akan dapat memberi kelancaran bersama, terlebih kelancaran kegiatan kepala daerah, terutama di Mimika untuk Bupati Mimika, serta pejabat teras yang lain, dalam daerah maupun di luar daerah, agar berjalan dengan baik.

Kegiatan diikuti oleh Forkopimda Mi-

mika, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, kepala distrik, instansi vertikal, kerukunan dan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Mimika.

Selanjutnya, materi yang dibagikan oleh Kepala Bagian Protokol pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Firmansyah Rasyid, S.IP., M.AP. mengenai Manajemen Keprotokolan, disimak dengan seksama oleh Bupati Mimika, Forkopimda, bahkan seluruh peserta hingga akhir.

Beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri diantaranya mengenai susunan acara yang biasanya diawali dengan pembukaan dan mengucapkan salam, baru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ternyata seharusnya setelah pimpinan memasuki tempat kegiatan dan masih dengan posisi berdiri kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dulu, selanjutnya salam pembuka. Demikian juga terkait Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau jas, bagi wanita tidak perlu memakai dasi.

Kemudian dilakukan sesi tanya jawab

dan ice breaking setelah isihoma, dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua yaitu Meutia Elfrida dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jakarta, yang sering memandu acara nasional, membagikan materi Dasar-dasar Master of Ceremony (MC). Narasumber mengajak peserta melakukan praktik langsung cara pernafasan perut/diafragma, latihan olah vokal dan latihan artikulasi, hingga sanggup membuat peserta tetap bertahan sampai acara penutupan.

Kegiatan sosialisasi keprotokolan ditutup secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum pada Setda Mimika, Hendritte W. Tandiyono, S.E., M.M., mewakili Bupati Mimika, dengan memberikan apresiasi kepada peserta yang masih mengikuti kegiatan hingga selesai.

“Menjadi seorang protokoler, MC atau pembawa acara ternyata tidak mudah. Semoga materi yang diberikan oleh narasumber menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua dan langsung dilakukan dalam kegiatan-kegiatan, untuk membangun Kabupaten Mimika yang lebih baik,” pungkasnya.

(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Jemput Bola ke Distrik Jila, Disdukcapil Layani Ratusan Warga

RATUSAN warga di Distrik Jila, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah akhirnya bisa memiliki dokumen administrasi kependudukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan layanan Jempol atau jemput bola langsung ke Jila.

Tim Jempol Adminduk Dukcapil Mimika terbang langsung ke Jila pekan lalu dan melakukan pelayanan selama tiga hari. Ini merupakan lanjutan dari program Jempol Adminduk di wilayah pegunungan dan pesisir yang sudah dijalankan Dukcapil Mimika di beberapa distrik yang sulit dijangkau.

Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo menyatakan, ini merupakan program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kota.

Kadis Dukcapil bersama staf dan Kadistrik Jila, Ruben Dolame dengan bantuan aparat Polsek Jila, Koramil Jila dan Pos Satgas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari pelayanan itu ada 265 kartu keluarga yang berhasil dicetak, 239 e-KTP, 30 Kartu Identitas Anak, 15 perekaman e-KTP, 3 registrasi KTP digital.

“Semua Dokumen adminduk tersebut langsung diserahkan kepada warga masyarakat dengan dibantu kepala kampung dan aparatnya,” jelas Slamet Sutejo.

Slamet Sutejo menyatakan Pemkab Mimika terus berupa keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Mimika bukan hanya di kota tetapi juga menjangkau dan mendekatkan pelayanan ke distrik dan kampung.

Kadistrik Jila, Ruben Dolame mewakili masyarakat Jila menyampaikan terima kasih atas pelayanan jemput bola yang langsung turun ke distrik dan kampung. “Supaya masyarakat tidak perlu repot ke naik turun Timika karena perlu biaya transportasi tiket pesawat yang mahal,” ujar Ruben Dolame. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Tim Jempol Adminduk Dukcapil Mimika terbang langsung ke Jila pekan lalu dan melakukan pelayanan selama tiga hari

Turnamen Badminton Piala Cartenz Bupati Cup 2023 Sambut HUT Mimika

DALAM rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Mimika yang jatuh pada 8 Oktober 2023 mendatang, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menggelar Turnamen Bulutangkis Bupati Cup memperebutkan Piala Cartenz.

Pertandingan mulai digulirkan Rabu (27/9/2023) ditandai dengan pemukulan shuttlecock pertama oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Willem Naa di Gor Futsal SP 2.

Willem mengapresiasi terselenggaranya Piala Cartenz Bupati Cup sebagai wadah menjaring atlet-atlet yang potensial, tidak hanya di lingkup kabupaten maupun provinsi, namun hingga ke tingkat nasional.

“Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat, dan di olahraga bulutangkis ini masih banyak potensi dan bakat yang terpendam,” tuturnya.

Turnamen ini kata Willem, jadi momentum untuk membangkitkan cabang olahraga bulutangkis di Mimika bahkan Papua Tengah. Sehingga dari Mimika nantinya bisa lahir atlet-atlet profesional yang bisa bermain di tingkat nasional.

“Menang ataupun kalah adalah hal yang biasa. Penting bahwa kemenangan sejati hanya dimiliki oleh orang yang berjuang. Tidak hanya mengandalkan otot dan strategi tetapi mereka juga menjunjung sportivitas dan fair play serta ketahanan dalam menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pertandingan,” ujar

Willem

Adapun turnamen ini ditujukan untuk para pemula, remaja dan taruna. Total peserta 177 orang dengan rincian tunggal anak putra 38 peserta, tunggal anak putri 15 peserta, tunggal pemula putra 26 peserta, tunggal pemula putri 11 peserta, tunggal remaja putra 38 peserta, tunggal remaja putri 9 peserta, tunggal taruna putra 22 peserta, tunggal taruna putri 8 orang. Para pemain ini berasal dari 28 klub termasuk dari Kabupaten Nabire, yaitu PB Rajawali PB Pratama Nabire.

Untuk kategori ganda beregu dewasa diikuti 122 pasang/peserta dengan rincian sebagai berikut, Kategori A ganda dewasa putra 5 partai sebanyak 50 pasang dari 10 club, Kategori B ganda dewasa putra 5 partai sebanyak 55 pasang dari 11 klub. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Turnamen Futsal Harhubnas di Mimika

MENYAMBUT Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap tanggal 17 September, insan perhubungan yang ada di Kabupaten Mimika menggelar berbagai kegiatan perlombaan salah satunya turnamen futsal.

Turnamen futsal yang diikuti insan perhubungan dan mitra mulai bergulir Selasa (12/9/2023) di Gor Futsal SP 2 Timika. Tim PJP melawan KP3 Udara menjadi laga pembuka turnamen usai dibuka secara

resmi oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Mimika, Frengky Lorens Taco.

Frengky mengatakan sudah menjadi agenda tahunan bagi insan perhubungan di Mimika untuk menggelar kegiatan dalam rangka harhubnas. Tahun ini ada pertandingan futsal, badminton dan tenis meja yang diikuti instansi perhubungan dan mitra yang bergerak di bidang perhubungan. Selain pertandingan olahraga ada juga lomba mewarnai dan puncak kegiatan nantinya dilaksanakan dalam bentuk upacara yang digelar pada 18 September 2023.

Menurut Frengky, insan perhubungan beserta mitra yang jumlahnya mencapai 100 di Mimika sangat antusias mengikuti setiap pertandingan yang digelar. Sehingga ia menilai ini merupakan momen yang tepat untuk peningkatan sinergitas dalam rangka peningkatan pelayanan sejalan dengan tema Harhubnas 'Melaju Untuk Transportasi Maju'. "Jadi perbaikan untuk layanan transportasi

sama-sama kita semangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga menambahkan, tema ini sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, akselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan.

"Tema ini juga sejalan dengan semangat Kemerdekaan Indonesia, yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan dorongan kepada kita para insan transportasi.

Bahwa kita harus terus belajar dan semangat untuk maju," kata Frengky. (BAPPE-DA)



Pertandingan futsal antara PJP dan KP3 Udara dalam rangka menyambut Harhubnas.

Foto: Bappeda

UNIPA Kaji Pengembangan Kopi Robusta di Mimika

PEMERINTAH Kabupaten Mimika mulai menggali potensi dari berbagai sektor untuk keberlanjutan Mimika pasca tambang. Setelah perikanan yang mulai meningkat, Pemkab Mimika juga sedang mengembangkan tanaman perkebunan seperti kopi dan kelapa.

Sebenarnya kopi sudah lama dikembangkan di Mimika terutama di Agimuga. Namun hanya terbatas di daerah tersebut sehingga perlu ada pengembangan. Untuk itu Pemkab Mimika melalui Bappeda menggandeng Universitas Negeri Papua (UNIPA) melakukan kajian terhadap wilayah yang potensial untuk pengembangan kopi khususnya robusta yang cocok dibudidayakan di wilayah dataran rendah.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi mengatakan, berdasarkan data hamparan kebun kopi di Mimika ada 315 hektar. Baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Perkebunan

yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat asli Papua ini bahkan sudah berproduksi.

Dalam mendorong produksi kopi, Pemkab Mimika kata Yohana melakukan pendampingan mulai dari pembukaan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen hingga pemasaran. "Pengembangan kopi di Mimika sudah kita kelola mulai dari hulu sampai ke hilir. Kebun ada, tanaman ada, bahkan kita siapkan kafe yang menjadi etalase produksi kopi lokal di Mimika," jelasnya.

Tapi menurutnya, itu belum cukup karena lahan di Mimika masih sangat potensial untuk pengembangan kopi robusta di wilayah dataran rendah. Sehingga Bappeda

menggendeng UNIPA untuk dilakukan kajian sebagai dasar bagi petani.

"Kopi kita tanam sekali tapi bisa produktif sampai puluhan tahun. Ini bisa jadi sumber daya baru pasca tambang bukan hanya kopi tapi tanaman perkebunan lain seperti kelapa dan pinang," tandasnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Mimika, Alice Wanma menambahkan, petani semakin semangat menanam kopi. Setidaknya sudah ada lima dari 7 jenis kopi robusta yang sudah dikembangkan di Mimika dan mulai berproduksi.

Dinas Pertanian kata dia, selalu melakukan pendampingan mulai dari persiapan lahan, bibit hingga pasca panen. Dimana dinas membeli kopi dari petani yang dijual melalui gerai UMKM khusus Kopi Amuro, brand kopi produksi lokal Mimika.sang dari 11 klub. **(BAPPEDA)**



Berkat Murib salah seorang petani kopi robusta di Kampung Mulia Kencana SP7, Distrik Iwaka.

Foto: Bappeda

Mendag Serahkan 5.000 Paket Bansos kepada Pemkab Mimika

TIDAK hanya berkunjung ke Pasar Sentral Timika untuk memantau harga komoditi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan juga bertemu dengan masyarakat sekaligus menyerahkan paket bantuan sebanyak 5000 paket yang disediakan oleh PT Freeport Indonesia melalui program CSR.

Penyerahan dan pembagian dilakukan di halaman Gereja KINGMI Mile 32. Bantuan diserahkan oleh Mendag yang didampingi staf khusus Mendag, Bara Hasibuan kepada Pemkab Mimika dalam hal ini Bupati Mimika, Eltinus Om-

aleng. Turut hadir dan menyaksikan penyerahan bantuan, EVP & Director Human Resources and Security PTFI Clementino Lamury di halaman Gereja Kingmi Mile 32, Mimika, Papua Tengah.

Kegiatan bakti sosial untuk masyarakat dilaksanakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan didukung penuh oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika guna memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Terdapat 5.000 paket bantuan sosial berupa bahan pokok

rumah tangga yang diserahkan kepada Pemkab Mimika untuk didistribusikan langsung bagi masyarakat.

“Atas nama Kementerian Perdagangan kami berterima kasih kepada Pemkab Mimika dan Freeport Indonesia atas kepedulian dan dukungannya sehingga kegiatan berbagi kasih untuk masyarakat di Mimika dapat terlaksana hari ini. Saya berharap bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini adalah langkah bersama kami agar masyarakat dapat menikmati kebutuhan pokok rumah



Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan kepada masyarakat Mimika.

Foto: Bappeda



tangga sehari-hari,” ujar Zulkifli Hasan.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng memberi apresiasi kepada Mendag Zulkifli Hasan yang telah menyisihkan waktunya bertemu masyarakat di Mimika. “Hari ini di depan masyarakat, Pak Menteri meluangkan waktu untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat Mimika. Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada pihak Freeport yang secara konsisten memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat,” ujar Eltinus Omaleng.





Mewakili PTFI, Clementino Lamury menyampaikan, “PTFI mendukung langkah Kemendag dalam melaksanakan program Kemendag Peduli untuk masyarakat. Hari ini kita melakukan bakti sosial bersama-sama dengan menyerahkan langsung paket bantuan sosial dari Kemendag Peduli dan PTFI. Hal ini merupakan salah satu komitmen PTFI, yakni berkontribusi kepada masyarakat setempat. Kami berharap dukungan ini dapat langsung dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat”, kata

Clementino.

Salah satu masyarakat Mimika yang menerima bantuan sosial dari Kemendag Peduli, Monalisa Kemong, telah sejak pagi berada di area bakti sosial untuk mendapatkan paket bantuan tersebut. “Kami masyarakat merasa senang mendapat kunjungan dan bantuan dari Bapak Menteri, Bapak Bupati, dan Freeport. Terima kasih atas bantuan bingkisan untuk kami,” ungkap

Monalisa.

Aksi bakti sosial ini merupakan wujud nyata pemerintah melalui Kemendag, Pemkab Mimika, serta pihak swasta, yakni PTFI, untuk dapat bekerja sama mendukung kesejahteraan masyarakat. PTFI secara konsisten selalu berupaya memberikan bantuan bagi masyarakat di wilayah sekitar, hal ini merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(BAPPEDA)



Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menyerahkan bantuan kepada masyarakat Mimika.

Foto: Bappeda

Bupati Serahkan Dua Mobil Hibah ke KPP Pratama Timika

SEBAGAI bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara dan daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan hibah berupa dua unit mobil kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika.

Hibah diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH pada Jumat (8/9/2023) di Resto Cenderawasih 66 kepada perwakilan KPP Pratama Timika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng me-

lalui Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut mengatakan pemberian hibah ini sebagai bentuk penghargaan Pemkab Mimika kepada KPP Pratama Timika sebagai instansi vertikal yang turut membantu Pemda dalam mengumpulkan penerimaan negara yang hasilnya juga dibagikan kepada kabupaten lewat bagi hasil.

"KPP Pratama Timika turut membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak sehingga itu jadi apresiasi pemerintah daerah sehingga dengan bantuan mobil

bisa menunjang operasional untuk meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan daerah," ujar Plt Sekda.

Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Pratama Timika, Harry Kristianto menyampaikan terima kasih kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang memberikan dukungan kendaraan operasional. "Mudah-mudahan kendaraan operasional ini dapat mendukung kami melaksanakan pekerjaan dalam menghimpun penerimaan negara," katanya. (BAPPE-DA)



Bupati Mimika, Eltinus Omaleng secara simbolis menyerahkan bantuan hibah berupa 2 unit mobil kepada KPP Pratama Timika.

Plt Sekda Pimpin Apel ASN

BUPATI Mimika, Eltinus Omaleng terus menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat penyerapan anggaran karena ini menjadi kendala dalam penyusunan APBD Perubahan.

Instruksi Bupati Mimika ini disampaikan oleh Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut dalam apel pagi yang digelar Senin (11/9/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan, SP 3. "Arahan dari bapak Bupati meminta supaya kita percepat penyerapan anggaran," katanya.

Rendahnya serapan anggaran yang belum mencapai 40 persen diungkapkan

Plt Sekda, jadi kendala dalam pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD. Sebelumnya Pemkab Mimika sudah mengajukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ke DPRD untuk dibahas bahkan sudah digelar rapat namun kemudian diskorsing dengan alasan serapan anggaran yang masih rendah.

Sehingga dikatakan Plt Sekda, ini jadi perhatian serius dari Bupati Mimika. Walaupun sebagian pejabat eselon 3 saat ini sedang mengikuti diklat kepemimpinan menurutnya bukan jadi alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan.

"Jadi pejabat eselon 3 yang ikut diklat

harus beri delegasi kepada bawahannya supaya progres pelaksanaan baik fisik maupun keuangan bisa cepat. Jangan bergantung ke orang karena kita ini bekerja dalam sistem dan itu saling mempengaruhi," tegasnya.

Plt Sekda juga kembali mengingatkan seluruh ASN dan honorer untuk tetap disiplin dalam bekerja mendukung program pemerintah yang sedang dilaksanakan karena tujuannya adalah untuk masyarakat. "Tetap disiplin masuk kantor, sebagai pegawai tetap bekerja, tidak usah lihat orang yang malas," tandasnya.

(BAPPEDA)



Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut memimpin apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika.

Cegah Inflasi Akibat Kenaikan Harga Beras

KENAikan harga beras yang terbilang signifikan dikhawatirkan bisa memicu kenaikan inflasi. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Mimika, Ouceu Satyadipura ketika ditemui Rabu (27/9/2023).

BPS kata Ouceu sedang melakukan perhitungan terhadap inflasi yang memang dilakukan setiap bulan. Kenaikan harga beras ini menjadi salah satu atensi utama mengingat beras adalah komoditi yang sangat berpengaruh karena merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. "Saya tidak bisa yakinkan, tapi yang saya khawatirkan memang kita harus warning, jangan sampai ini dibiarkan terus," jelasnya.

Apalagi kata Ouceu, tidak lama lagi

akan memasuki perayaan hari besar keagamaan yakni natal dan tahun baru, sehingga permintaan akan meningkat. Untuk itu perlu adanya intervensi dari pemerintah agar harga beras bisa dikendalikan.

Jika itu tidak dilakukan dan tetap dibiarkan maka akan berdampak sistemik ke masyarakat. "Kalau harga naik, pasti ada beberapa opsi bagi masyarakat salah satunya mengurangi konsumsi yang dampaknya adalah miskin makanan, itu berarti penduduk miskin akan bertambah jika inflasi tinggi karena harga naik," terangnya.

BPS akan melakukan perhitungan inflasi yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal ini Tim Penanggulangan

Inflasi Daerah dalam rangka stabilisasi harga. Meskipun stok dan harga beras yang disediakan Bulog dalam kondisi aman dan normal tetapi kenaikan harga beras premium sangat berdampak bagi masyarakat.

Terlebih Mimika adalah daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar. Bukan hanya kenaikan harga beras di daerah asal, ditambah lagi adanya kenaikan tarif ekspedisi tentu akan membuat harga naik lebih tinggi.

"Kalau ekspedisi yang mahal harus ada intervensi pemerintah daerah untuk pakai batasan harga, karena saya dengar harga ekspedisi mulai gila-gilaan, di situlah Pemda harus segera intervensi," tandasnya. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Bulog Timika Pastikan Stok Beras Cukup Hingga Akhir Tahun 2023

KANTOR Seksi Logistik yang menangani distribusi beras di Timika memastikan stok beras cukup untuk kebutuhan hingga akhir Tahun 2023. Bukan hanya untuk Kabupaten Mimika tapi juga untuk Kabupaten Puncak dan Nduga yang masuk dalam wilayah pelayanan Bulog Timika.

Kepala Kantor Bulog Timika, Riyadi Muslim yang ditemui Selasa (26/9/2023) mengatakan stok beras yang ada di gudang sekarang ada 1.900 ton dan yang dalam proses bongkar muat di pelabuhan sebanyak 1.500 ton. Bahkan akan dilakukan penambahan lagi sekitar 3 ribu ton.

Stok beras ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan beras jatah bagi ASN, TNI dan Polri tetapi juga untuk masyarakat umum. Untuk kebutuhan ASN, TNI dan Polri di tiga kabupaten yakni Mimika, Puncak dan Yahukimo

sekitar 300 ton per bulan. Sisanya adalah untuk program beras sejahtera atau dulunya disebut raskin dan juga beras premium untuk dikomersilkan.

Riyadi mengatakan, menyikapi kenaikan harga sekarang ini, Bulog ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga dengan mendistribusikan beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Beras kualitas premium ini dijual dengan harga medium Rp 11.800 per kilogram sebagai harga eceran tertinggi atau per 5 kilogram Rp 59 ribu.

Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, Bulog juga mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan pembagian bantuan pangan kepada sedikitnya 15 ribu keluarga penerima di Mimika. "Jadi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan menurunkan perm-

intaan terhadap pasar," tegasnya.

Meski tidak lagi ditugaskan, Bulog juga masih menyediakan minyak goreng dengan harga yang murah. Hanya saja stoknya tersisa 30 ribu liter dengan harga Rp 17 ribu per liter. Sementara minyak kita yang jadi program pemerintah sudah dua bulan ini, Bulog Timika tidak mendapat pasokan seiring tingginya permintaan.

Sama halnya dengan gula. Bulog yang diberi penugasan terakhir Tahun 2019 lalu, namun masih menyediakan gula untuk stabilisasi harga. Saat ini stok menipis dan masih dengan harga yang belum mengalami kenaikan yakni Rp 705 ribu per sak. Sementara di pasar sudah naik hingga Rp 750 ribu per sak. "Kalau gula, karena bukan statusnya penugasan jadi kami ikuti harga pasar. Jadi kami belinya juga dengan harga yang sudah naik," jelasnya. (BAPPEDA)



Proses bongkar muat beras di Gudang Bulog Timika.



Mimika Membangun